

KINERJA BPOM

DALAM ANGKA

TRIWULAN I TAHUN 2020





BADAN POM

KINERJA BPOM

DALAM ANGKA TRIWULAN I TAHUN 2020

SAMBUTAN KEPALA BPOM RI

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat Rahmad dan RidhoNya sehingga BPOM dapat terus hadir melayani dan melindungi masyarakat melalui jaminan obat dan makanan yang aman, berkualitas/bermanfaat, dan bermutu. Kinerja BPOM sampai dengan Triwulan I Tahun 2020 dituangkan dalam “**Kinerja BPOM Dalam Angka**”. Buku ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban BPOM dalam pelaksanaan anggaran pemerintah dan juga sumber informasi tentang hasil - hasil Pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam buku ini disampaikan hasil pengawasan Obat dan Makanan baik yang dilakukan BPOM sendiri maupun bermitra dengan pemangku kepentingan yang mencakup standardisasi, evaluasi *pre-market*, hingga pengawasan *post-market* yang disertai upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

Pada tahun 2020 ini, pandemi COVID 19 yang melanda dunia mampu mengubah hampir seluruh tatanan kehidupan dan kebiasaan kita. Tidak terkecuali juga dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2020, beberapa kinerja yang telah dicapai Badan POM diantaranya adalah penerbitan 42.032 NIE, pemeriksaan di 4.343 sarana produksi dan sarana distribusi, pengujian 9.754 sampel, penemuan 47 perkara, dan 17 kegiatan KIE.

Terima kasih kepada seluruh jajaran BPOM serta mitra kerja atas kinerja yang dicapai sampai dengan Triwulan I Tahun 2020. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua mitra kerja BPOM sebagai bahan evaluasi bagi pelaksana kegiatan agar terus berupaya bersama meningkatkan kinerja pada masa mendatang, dalam upaya melayani dan melindungi masyarakat.



Jakarta, 7 Juli 2020
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan,

Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KEPALA BPOM R.I	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
HIGHLIGHT	1
HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN.....	4
I. Hasil Pengawasan Keamanan, Khasiat dan Mutu Produk Obat dan Makanan	5
II. Standardisasi	11
III. Riset dan Kajian di Bidang Obat dan Makanan	13
IV. Pemberdayaan Mitra Kerja dan Masyarakat.....	13
V. Digitalisasi Pelayanan Publik	17
VI. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan.....	18
VII. Penguatan dan Penataan Organisasi dan Tata Laksana	18
VIII. Layanan Advokasi Hukum (Pelayanan Hukum).....	21
IX. Kerjasama Internasional	22
X. Pengelolaan Anggaran	22
XI. Pemantauan Capaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BPOM	23
PENUTUP	23
LAMPIRAN	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Profil Registrasi Obat dan Makanan s.d. Triwulan I Tahun 2020	5
Gambar 2.	Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan Sebelum Beredar/ Dipublikasikan s.d. Triwulan I Tahun 2020	5
Gambar 3.	Profil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan s.d. Triwulan I Tahun 2020	6
Gambar 4.	Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan s.d. Triwulan I Tahun 2020	6
Gambar 5.	Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Targeted) s.d. Triwulan I Tahun 2020...	7
Gambar 6.	Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Random) s.d. Triwulan I Tahun 2020 ...	7
Gambar 7.	Profil Sertifikasi Obat dan Makanan s.d. Triwulan I Tahun 2020.....	8
Gambar 8.	Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan s.d. Triwulan I Tahun 2020.....	8
Gambar 9.	Profil Pengawasan Label Obat dan Makanan s.d. Triwulan I Tahun 2020	9
Gambar 10.	Profil Laporan Efek Samping s.d. Triwulan I tahun 2020.....	9
Gambar 11.	Kemajuan Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan s.d. Triwulan I Tahun 2020	10
Gambar 12.	Data Pemenuhan Permohonan Wawancara dari Media s.d. Triwulan I Tahun 2020	13
Gambar 13.	Total Aktivitas Media Sosial Badan POM s.d. Triwulan I Tahun 2020.....	14
Gambar 14.	Total Engagement Badan POM Triwulan I 2020.....	14
Gambar 15.	Diagram Sebaran Pemberitaan Badan POM di Media Triwulan I 2020.....	15
Gambar 16.	Total Jumlah Pemberitaan tentang Badan POM Selama Triwulan I 2020.....	15



BADAN POM

HIGHLIGHT

s.d. TRIWULAN I TAHUN 2020

Optimalkan Percepatan Pelaksanaan Pengadaan 2020, Badan POM Gelar Workshop Pengadaan Barang/Jasa

Jakarta / Rabu (15/01/2020)

Jakarta - Presiden RI, Joko Widodo pada acara Rakernas Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2019 telah menginstruksikan agar pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2020 segera dilaksanakan Kementerian/Lembaga (K/L) sejak awal tahun. Guna melaksanakan instruksi Presiden sekaligus mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang transparan, akuntabel, dan profesional, Badan POM menggelar workshop dengan tema "Mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Badan POM yang Tepat (Transparan, Akuntabel, Profesional) dan Efisien dalam Rangka Percepatan dan Peningkatan Efektifitas Pengadaan Barang/Jasa" di Jakarta (15/01). Workshop diikuti 158 peserta yang terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) dan Pejabat Pengadaan di lingkungan Badan POM, dengan menghadirkan 12 narasumber dari K/L terkait.



Perkuat Kerja Sama, Badan POM Terima Kunjungan USP

Jakarta/ Jumat (24/01/2020)

Jakarta - "Badan POM menyambut baik komitmen *United States of Pharmacopeia* (USP) untuk terus menjadi mitra kerja peningkatan fungsi regulatori Badan POM sebagai Otoritas Regulator Obat Nasional," demikian disampaikan Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito saat menerima kunjungan Ms. Gersande Chavez (*Vice President-Partnership and Growth*, USP Headquarter di Jakarta) di kantor Badan POM, Jumat (24/01). Pada kunjungan tersebut, USP menyampaikan dukungannya untuk meningkatkan sistem pengawasan Badan POM melalui program "*GFATM Funding Cycle 2020 – 2022*" dari lembaga donor internasional *Global Fund*. Program tersebut akan mencakup berbagai penguatan di berbagai bidang pengawasan Badan POM, diantaranya adalah untuk memperkuat sistem *post market surveillance* dalam ruang lingkup obat TB, HIV, dan antimalaria tertentu.



Bursa Hilirisasi Inovasi Herbal Indonesia 2020: Pertemuan Peneliti dan Pelaku Usaha untuk Percepat Pengembangan Herbal Indonesia



Jakarta / Rabu (19/02/2020)

Jakarta - Potensi pengembangan obat herbal di Indonesia terus menjadi sorotan Pemerintah. Poin penting yang ditekankan adalah fakta bahwa terdapat beragam spesies tanaman dan hewan di Indonesia yang diketahui memiliki khasiat pengobatan, namun belum dimanfaatkan secara optimal sebagai bahan baku obat herbal. Padahal permintaan masyarakat akan obat tradisional (OT) dan suplemen kesehatan dari bahan alam terus meningkat seiring dengan meningkatnya tren gaya hidup *back to nature*. Termotivasi dari hal tersebut, Badan POM menggelar acara bertajuk Bursa Hilirisasi Inovasi Herbal Indonesia 2020 di Jakarta. Acara yang berlangsung selama dua hari pada 19-20 Februari ini merupakan ajang bagi para akademisi dan peneliti untuk menginformasikan serta mempromosikan hasil penelitiannya di bidang herbal kepada pelaku usaha dan masyarakat.

Bersama Lintas Sektor, Badan POM Wujudkan Obat dan Makanan Aman

Semarang / Kamis (27/02/2020)

Semarang – Badan POM sangat memprioritaskan pengembangan berbagai inovasi untuk melakukan percepatan pengembangan industri farmasi, termasuk aspek percepatan pada proses sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan perizinan produk obat, yang merupakan bagian dari pengawasan *pre-market*. Di sisi lain, perlu penguatan pengawasan *post-market* untuk terus menjamin bahwa obat yang beredar di masyarakat aman, berkhasiat, dan bermutu. Dalam rangka penguatan pengawasan *post-market* tersebut, Badan POM menggelar *Workshop* Modul Farmakovigilans untuk Industri Farmasi. *Workshop* yang diadakan selama dua hari pada tanggal 26 - 27 Februari 2020 ini terlaksana atas kerja sama dengan *Japan International Cooperation Agency* (JICA). *Workshop* ini penting sebagai upaya untuk menyamakan persepsi, meningkatkan pemahaman dan kompetensi industri farmasi dalam farmakovigilans.



Bersama Badan POM, Finalis Putri Indonesia Perangi Kosmetik Ilegal



Jakarta / Rabu (04/03/2020)

Jakarta - Semakin maraknya promosi produk kosmetik di dunia daring baik dalam bentuk iklan, penjualan, maupun *endorsement* oleh selebriti atau *public figure* milenial, perlu diimbangi dengan tingkat pengetahuan dan kepedulian masyarakat tentang memilih dan menggunakan kosmetik yang aman.

Badan POM bersama Yayasan Puteri Indonesia (YPI) menggelar Pembekalan Puteri Indonesia, yang merupakan program kedua setelah sebelumnya pernah dilaksanakan pada tahun 2019. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya memberantas peredaran kosmetik ilegal. Pembekalan diberikan kepada 39 orang calon Puteri Indonesia tahun 2020 untuk menjadi Duta Kosmetik Aman, di Aula Gedung C Badan POM.

Penuh Antusias, Pelajar Mamuju Ikuti Edukasi Pangan Aman oleh Badan POM

Mamuju / Rabu (11/03/2020)

Mamuju - Upaya untuk mewujudkan Pangan Jajanan Anak Sekolah yang aman, bermutu, dan bergizi perlu didukung oleh partisipasi aktif dan terpadu dari lintas sektor terkait. Kali ini hadir di tepi barat Pulau Sulawesi, Badan POM menyelenggarakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada Generasi Milenial di Mamuju bertajuk "Gebyar Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, Sehat, dan Bermutu".

Kegiatan KIE ini diikuti oleh 100 orang pelajar yang berasal dari SMPN 2 Mamuju, MTs Negeri Binanga, dan MAN Mamuju. Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito memandu langsung kegiatan dan memaparkan materi 5 Kunci Keamanan Pangan kepada para pelajar di mamuju tersebut. "5 Kunci Keamanan Pangan yaitu kenali pangan yang aman, beli pangan yang aman, baca label dengan seksama, jaga kebersihan dan catat apa yang ditemui," paparnya.





BADAN POM

HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

s.d. TRIWULAN I TAHUN 2020

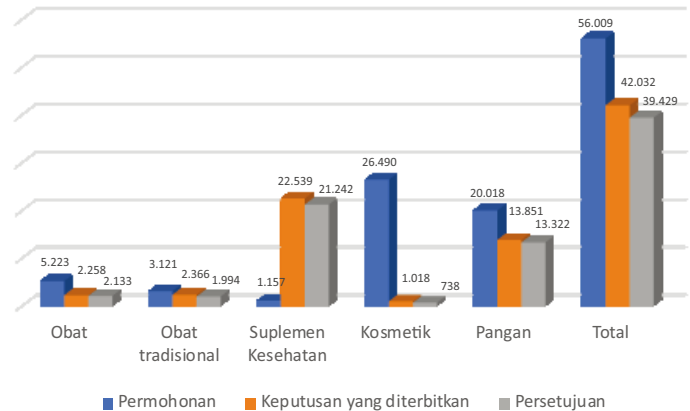
I. Hasil Pengawasan Keamanan, Khasiat dan Mutu Obat dan Makanan

Pengawasan *pre-market*

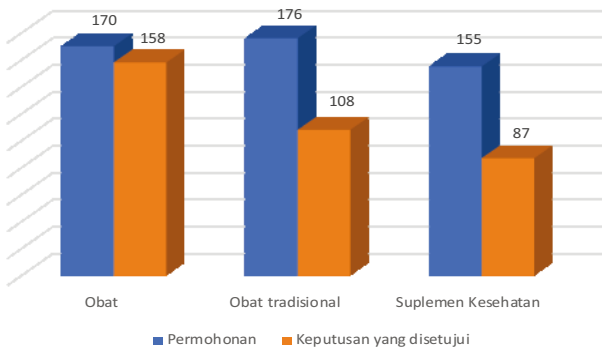
Sebelum Obat dan Makanan diproduksi atau diimpor dan diedarkan di wilayah Republik Indonesia, Obat dan Makanan harus melalui registrasi oleh BPOM untuk dievaluasi terkait aspek keamanan, khasiat dan mutu serta informasi melalui penandaan/label.



Sampai dengan Triwulan I tahun 2020, telah diterbitkan **42.032** keputusan dan **39.429** persetujuan izin edar dari **56.009** berkas permohonan registrasi Obat dan Makanan.



Gambar 1. Profil Registrasi Obat dan Makanan s.d. Triwulan I Tahun 2020



Gambar 2. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan Sebelum Beredar/ Dipublikasikan s.d. Triwulan I Tahun 2020



Untuk melindungi masyarakat dari klaim yang menyesatkan, BPOM telah melakukan evaluasi rancangan iklan terhadap kebenaran klaim iklan khusus obat bebas, obat bebas terbatas, obat tradisional dan suplemen kesehatan yang telah mendapatkan ijin edar sebelum ditayangkan atau diedarkan. **Sampai dengan Triwulan I tahun 2020, dari 501 permohonan persetujuan rancangan iklan, telah disetujui 353 (70,46 %) iklan.**

Pengawasan *post-market*

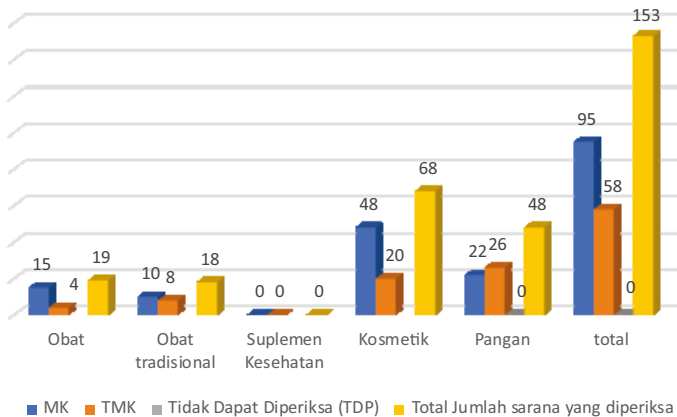
Pengawasan *post-market* dilakukan setelah produk beredar untuk memastikan bahwa Obat dan Makanan yang beredar aman, berkhasiat dan bermutu serta informasi produk sesuai dengan yang disetujui, dilakukan melalui :

1

Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi

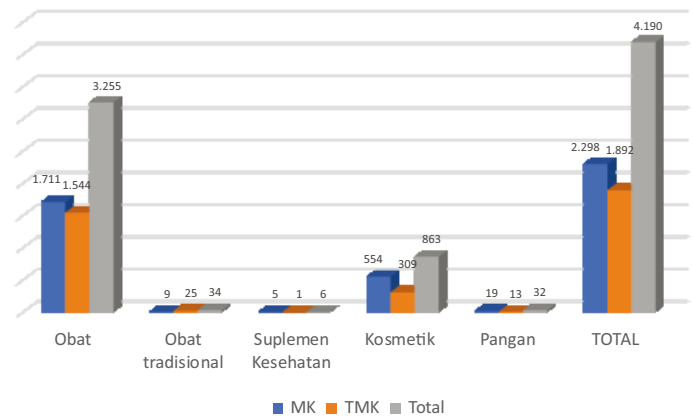
BPOM melakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin kepatuhan implementasi Cara Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan Yang Baik.

Sampai dengan Triwulan I tahun 2020 telah diperiksa sebanyak **153 sarana produksi** Obat dan Makanan dengan **95 (62,09%)** sarana adalah TMK.



Gambar 3. Profil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan s.d. Triwulan I tahun 2020

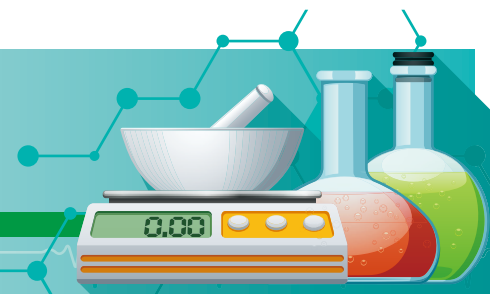
Sampai dengan Triwulan I tahun 2020 telah diperiksa **4.190 sarana distribusi** Obat dan Makanan dengan **1.892 (45,15%)** sarana adalah TMK.



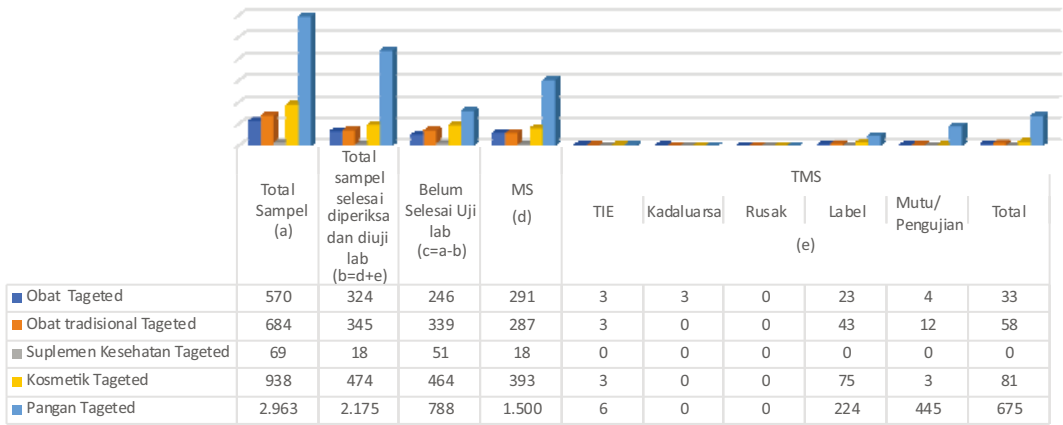
Gambar 4. Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan s.d. Triwulan I tahun 2020

Keterangan:

MK = Memenuhi Ketentuan
TMK = Tidak Memenuhi



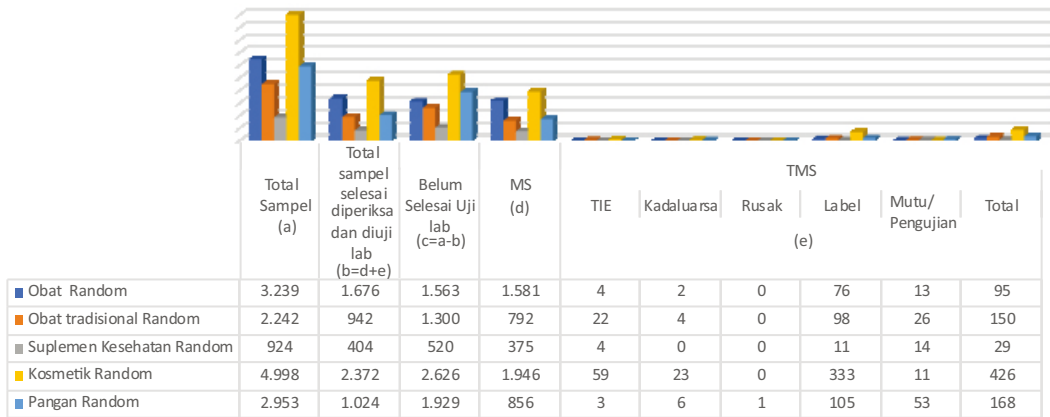
A. Targeted



Keterangan:
MS = Memenuhi Syarat
TMS = Tidak Memenuhi Syarat
TIE = Tanpa Izin Edar

Gambar 5. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Targeted) s.d. Triwulan I tahun 2020

B. Random / Acak



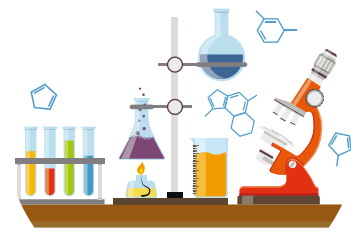
Keterangan:
MS = Memenuhi Syarat
TMS = Tidak Memenuhi Syarat
TIE = Tanpa Izin Edar

Gambar 6. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Random) s.d. Triwulan I tahun 2020

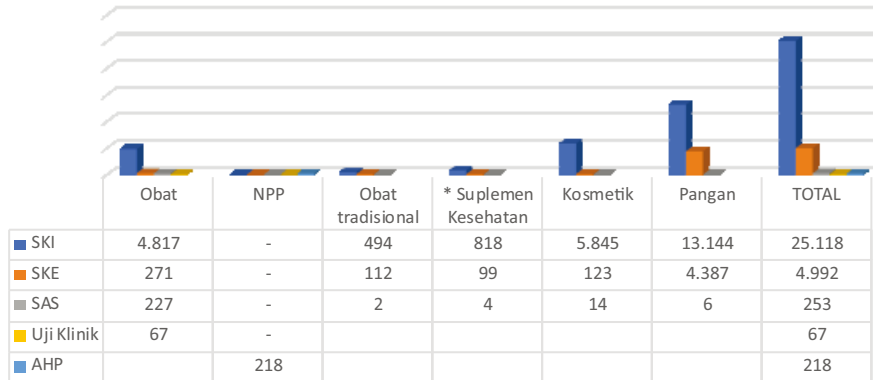
* Sumber data Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK)

Sampai dengan **Triwulan I tahun 2020**, dari **5.224 sampel targeted** yang disampling terdapat 3.336 sampel yang selesai diperiksa dan diuji laboratorium, dimana **2.489 (74,61%)** sampel memenuhi syarat.

Sampai dengan **Triwulan I tahun 2020**, dari **14.356 sampel random** yang disampling terdapat 6.418 sampel yang selesai diperiksa dan diuji laboratorium, dimana **5.550 (86,48%)** sampel memenuhi syarat.



Dalam rangka mendorong ekspor dan impor pengawasan Produk dan Bahan Baku yang masuk ke wilayah Indonesia, BPOM mengeluarkan Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE), SAS (*Special Access Scheme*), Uji Klinik, dan AHP (Analisa Hasil Pengawasan) Obat dan Makanan. Sampai dengan **Triwulan I tahun 2020** telah diterbitkan **25.118 SKI, 4.992 SKE, 253 SAS, 67 Uji Klinik, dan 218 AHP** Obat dan Makanan.

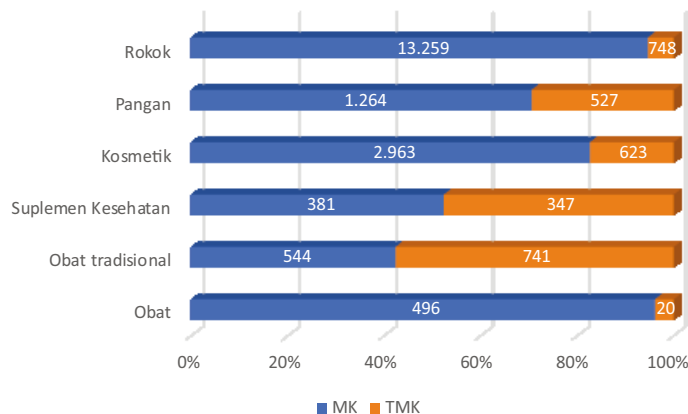


* Termasuk Kuasi

Gambar 7. Profil Sertifikasi Obat dan Makanan s.d. Triwulan I tahun 2020

Pengawasan Iklan

4



Untuk mencegah masyarakat mendapatkan informasi yang salah dan menyesatkan tentang produk Obat dan Makanan, BPOM melakukan pengawasan iklan produk di beberapa jenis media antara lain media cetak, televisi, radio, luar ruang dan *leaflet*/brosur. Sampai dengan Triwulan I tahun 2020, dari 21.913 iklan Obat dan Makanan yang diawasi, 18.907 (86,28%) iklan memenuhi ketentuan.

Gambar 8. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan s.d. Triwulan I tahun 2020



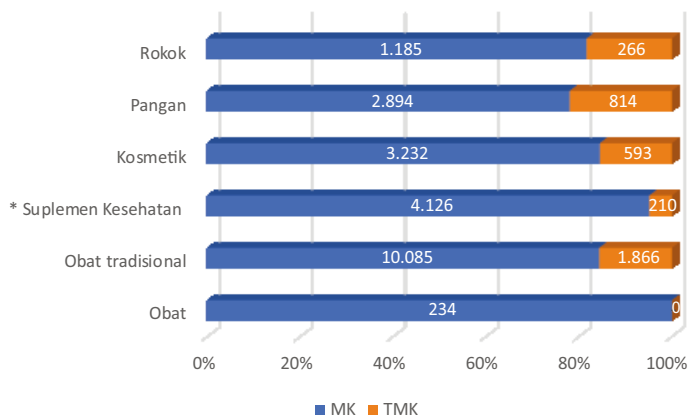
BPOM juga mengawasi kesesuaian label produk Obat dan Makanan yang beredar dengan yang telah disetujui BPOM, agar tidak memberikan informasi yang salah dan menyesatkan kepada masyarakat. **Sampai dengan Triwulan I tahun 2020, dari 25.505 label Obat dan Makanan yang diawasi, 21.756 atau sekitar**

85,30% label memenuhi ketentuan.

* Termasuk Kuasi

5

Pengawasan Label



Gambar 9. Profil Pengawasan Label Obat dan Makanan s.d. Triwulan I tahun 2020

6

Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (MESOT), Monitoring Efek Samping Suplemen Kesehatan (MESSK), Monitoring Efek Samping Kosmetik (MESKOS)

Penggunaan Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik oleh berbagai kalangan masyarakat, maka resiko timbulnya efek yang tidak diinginkan tetap ada. Oleh karena itu, BPOM melakukan evaluasi aspek keamanan produk yang beredar terhadap seluruh laporan efek samping yang diterima dari masyarakat dan/atau tenaga kesehatan, dengan membentuk Tim/Panitia

- MESO, MESOT, dan MESSK terdiri dari ahli farmakologi/farmakologi klinik dan beberapa tenaga ahli lainnya
- MESKOS terdiri dari dokter spesialis kulit.



Komoditi	Jumlah Laporan	Jumlah laporan Tindaklanjuti	Persentase (%)
Obat	2.499	1.845	73,83
Obat Tradisional	32	32	100,00
Suplemen Kesehatan	5	5	100,00
Kosmetik	312	158	50,64

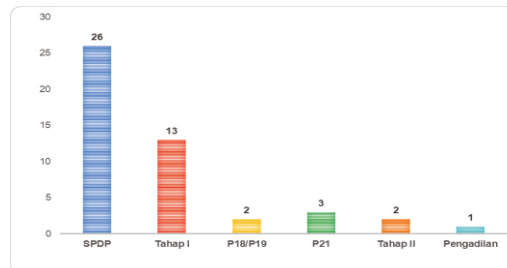
Gambar 10. Profil Laporan Efek Samping s.d Triwulan I tahun 2020



Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan

Dalam rangka memberantas dan menertibkan peredaran produk Obat dan Makanan ilegal termasuk palsu serta obat keras disarana yang tidak berhak, Badan POM secara terus menerus melakukan investigasi awal dan penyidikan kasus tindak pidana di bidang Obat dan Makanan. Upaya ini dilakukan secara mandiri maupun bersinergi dengan instansi penegak hukum lainnya (dalam kerangka Operasi Gabungan Nasional dan Operasi Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal).

Sampai dengan Triwulan I pada tahun 2020, PPNS Badan POM telah menindaklanjuti perkara sebanyak 47 perkara dengan nilai barang bukti sebesar Rp. 37.616.594.619,-. Dari 47 perkara tersebut, 26 perkara masih dalam tahap SPDP, 13 perkara pada tahap I, 2 perkara pada tahap P18/19, 3 perkara pada tahap P21, 2 perkara sudah penyerahan tersangka dan barang bukti kepada JPU (Tahap II) dan 1 perkara sudah mendapatkan putusan pengadilan.



Gambar 11. Kemajuan Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan s.d. Triwulan I Tahun 2020

Operasi Pangea XIII

Operasi Pangea ialah operasi internasional yang dilakukan di bawah koordinasi Interpol yang target operasinya adalah produk sediaan farmasi dan pangan baik palsu ataupun ilegal yang diperdagangkan secara *online* dengan fokus utama yaitu pada peredaran obat-obat ilegal. Indonesia telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan internasional tersebut sejak tahun 2011 yaitu pada Operasi Pangea IV, dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai *National Coordinator* dalam kegiatan tersebut. Selama pelaksanaan Operasi Pangea XIII Tahun 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 184 Sarana. Dari 184 sarana yang diperiksa, sebanyak 48 kasus akan diproses secara *pro-justitia*, 136 kasus akan ditindaklanjuti secara *non pro-justitia*. Jumlah temuan selama operasi ini sebanyak 6.257 item (374.122 pieces) dengan nilai temuan sebesar Rp. 38.238.295.985,- (Tiga Puluh Delapan Milliar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).

Berdasarkan hasil penelusuran secara *online*, Badan POM telah mengidentifikasi 1.739 situs website/ media sosial/ marketplace yang menjual Obat dan Makanan ilegal dengan rincian yaitu 22 Website, 1.483 akun di *Marketplace* dan 234 Media Sosial baik berupa *Facebook*, *Instagram*, *Whatsapp* dan lain-lain. Sebagai tindak lanjut, telah diusulkan terhadap 1.740 website/media sosial/ *marketplace* yang menjual Obat dan Makanan ilegal tersebut dilakukan tindakan *takedown* oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 22 situs website sedangkan untuk 1.439 akun di *marketplace* akan diusulkan ke pihak *marketplace* untuk dilakukan pemblokiran.

II. Standardisasi

Dalam rangka mengawal mutu Obat dan Makanan, telah disusun standar/regulasi/pedoman di Bidang Obat dan Makanan.



Obat

Telah disusun 12 (dua belas) peraturan/standar/pedoman obat dengan progres sebagai berikut:

1. Revisi Peraturan BPOM No. 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengawasan Periklanan Obat (71,43%).
2. Revisi Peraturan BPOM No. 33 Tahun 2018 tentang Penerapan 2D Barcode dalam Pengawasan Obat dan Makanan (71,43%).
3. Revisi Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara Sertifikasi CDOB (28,57%).
4. Revisi Peraturan BPOM No. 4 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (14,29%).
5. Revisi Peraturan Kepala BPOM No.24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat (11,11%).
6. Revisi Peraturan Kepala BPOM No. HK.00.05.1.3682 Tahun 2005 tentang Tata Laksana Uji Bioekivalensi (11,11%).
7. Revisi Peraturan Kepala BPOM No. HK.03.1.23.12.11.10690 Tahun 2011 tentang Penerapan Farmakovigilans Bagi Industri Farmasi (11,11%).
8. Revisi Peraturan Kepala BPOM No. 25 Tahun 2015 tentang Tata Laksana Persetujuan Uji Klinis (11,11%).
9. Rancangan Peraturan BPOM tentang Pedoman Tindak Lanjut Obat Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan (0%).
10. Penyusunan Standar Obat Non Kompendial (28,57%).
11. Penyusunan Suplemen I Farmakope Indonesia Edisi VI (Revisi) (60%).
12. Penyusunan Standar Mutu Produk Biologi (Revisi) (33,33%).



Obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan

Telah disusun 7 (tujuh) peraturan/standar/pedoman obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan, progres sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pedoman Uji Toksisitas Non Klinik Secara In Vivo (Revisi Lampiran Peraturan Kepala Badan POM Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Uji Toksisitas Non Klinik Secara In Vivo) (25%).
2. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Persyaratan Teknis CPOTB (Revisi Lampiran Peraturan Kepala Badan POM Nomor Hk.03.1.23.06.11.5629 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis CPOTB (40%).
3. Pedoman Uji Klinik Obat Herbal (25%).
4. Rancangan Peraturan badan POM tentang Pola Tindak Lanjut Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (25%).
5. Pedoman Clustering Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (25%).
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Tata Cara Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB) (40%).
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Klaim Kosmetika (25%).

Telah disusun 9 (sembilan) kajian obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan, yaitu:

1. Kajian Produk Baru Minyak Sacha Inchi (100%).
2. Kajian Rasionalitas Komposisi dan Klaim Produk Merit Fiber (100%).
3. Kajian Bahan Baku Baru Obat Tradisional Jahe Hitam (Black Ginger) (100%).
4. Kajian Bahan Aktif Aphanizomenon Flos-aquae Extract (100%).
5. Kajian Keamanan dan Kemanfaatan Bahan Aktif Baru Fulvic Acid Sebagai Suplemen Kesehatan (100%).
6. Kajian Keamanan dan Kemanfaatan Kombinasi Baru: Ekstrak Kering Prunus mume dan Choline Bitartrate sebagai Produk Suplemen Kesehatan (100%).
7. Kajian Keamanan Penggunaan Dibasic Calcium Phosphate Dihydrate dalam Suplemen Kesehatan (100%).
8. Kajian tentang Daun Sembung (*Blumea balsamifera* Folium) sebagai Bahan Kosmetika dalam Produk Rempah Mandi (100%).
9. Kajian tentang Daun Legundi (*Vitex trifolia* Folium) sebagai Bahan Kosmetika dalam Produk Rempah Mandi (100%).



Pangan

Telah disusun 10 (sepuluh) peraturan, standar, maupun pedoman pangan olahan, dengan progres sebagai berikut::

1. Rancangan Revisi Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2016 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol (30%).
2. Rancangan Revisi Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.11.11.09657 Tahun 2011 tentang Persyaratan Penambahan Zat Gizi dan Zat Non Gizi pada Pangan Olahan (20%).
3. Rancangan Revisi Peraturan Kepala BPOM Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pangan Steril Komersial (Pangan Berasam Rendah) (20%).
4. Rancangan Revisi Peraturan Kepala BPOM Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengawasan Klaim Label dan Iklan Pangan Olahan (20%).
5. Rancangan Revisi Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2019 tentang Informasi Nilai gizi pada Label Pangan Olahan (untuk ING UMK dan takaran saji kurang dari ½ saji atau berat bersih kecil) (20%).
6. Rancangan Revisi Peraturan Kepala Badan POM tentang Persyaratan Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Perisa (50%).
7. Pedoman Pelabelan Pangan : Umum (30%).
8. Pedoman Bahan Baku (30%).
9. Pedoman Akrilamida (30%).
10. Pedoman Implementasi Peraturan Kemasan Pangan (50%).



III. Riset dan Kajian di Bidang Obat dan Makanan

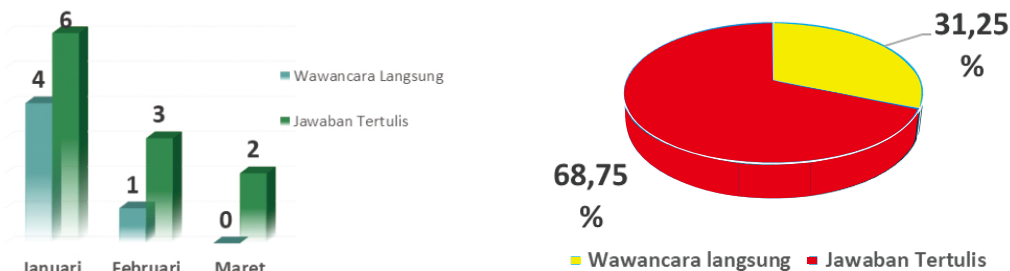
Riset dan kajian dilakukan untuk mendukung kebijakan dan penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan. Riset dan kajian yang dilakukan dapat menghasilkan data, informasi, ataupun rekomendasi bagi kebijakan yang dapat menjadi baseline juga data penunjang dalam penyusunan kebijakan.

Sampai dengan triwulan I tahun 2020 dari 7 (tujuh) riset dan kajian yang ditargetkan, telah dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kajian dan riset yang masih dalam progress, yaitu:

1. Kajian Peredaran Obat Obat yang disalahgunakan (10%).
2. Pengukuran IKU BPOM 2020 (10%).
3. Kajian Keamanan Pangan (INARAC) (18%).
4. Survei Perilaku Kemanan Pangan pada Pelajar (10%).
5. Riset Tingkat Pemahaman Pelaku Usaha Terhadap Proses Registrasi Pangan Olahan (14%).
6. Kajian Implementasi Kebijakan CPOTB Bertahap Kepada UMKM OT (25%).
7. Kajian Implementasi Inpres no. 3 tahun 2017 dalam pengawasan Obat dan Makanan (20%).

IV. Pemberdayaan Mitra Kerja dan Masyarakat

Pada triwulan I tahun 2020, Badan POM telah menerbitkan 12 (dua belas) siaran pers dan 3 (tiga) penjelasan/klarifikasi terkait isu Obat dan Makanan. Seluruh siaran pers dan penjelasan/klarifikasi berita dipublikasikan melalui *website* dan media sosial official Badan POM, serta disebarakan ke berbagai media. Pemberian informasi tentang kinerja Badan POM maupun tentang Obat dan Makanan dilakukan melalui berbagai cara, antara lain melalui pemenuhan permintaan wawancara atau talkshow dari media. Selama triwulan I tahun 2020 telah dilakukan 16 (enam belas) kali wawancara dengan media dan 1 (satu) kali *talkshow* atas permintaan media. 68,75% permohonan wawancara dari media ditindaklanjuti melalui jawaban tertulis, untuk efektivitas waktu.



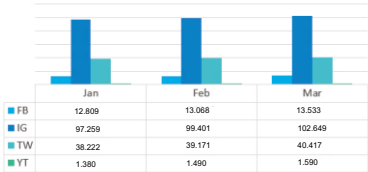
Gambar 12. Data Pemenuhan Permohonan Wawancara dari Media s.d. Triwulan I Tahun 2020

Untuk meningkatkan publikasi kinerja Badan POM secara rutin setiap saat, maka selama triwulan I tahun 2020 telah diunggah 45 (empat puluh lima) berita aktual di website www.pom.go.id sekaligus menyebarkannya ke berbagai media. Berita aktual tersebut merupakan hasil peliputan kegiatan Badan POM selama triwulan I tahun 2020, yaitu sebanyak 56 (lima puluh enam) peliputan kegiatan di pusat maupun daerah.

Berbagai media dimanfaatkan Badan POM untuk menyosialisasikan kegiatan strategisnya termasuk media sosial *official*. Selama triwulan I tahun 2020, aktivitas media sosial *official* Badan POM pada 4 *platform* media sosial yaitu *Facebook*, *Instagram*, *Twitter*, dan *Youtube* mencapai 748 *post*. Aktivitas tertinggi melalui *platform Twitter* yaitu sebanyak 461 *tweets*, dilanjutkan dengan *Instagram* sebanyak 135 *post*, *Facebook* sebanyak 132 *post*, dan *Youtube* sebanyak 20 video.

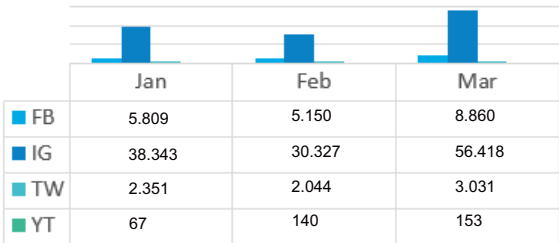
Sementara itu, pertumbuhan *audience* pada triwulan I tahun 2020 terhadap 4 *platform* media sosial mengalami kenaikan yang cukup stabil. Pada bulan Januari, total *audience* sebanyak 149.670, sementara di bulan Februari, *audience* mencapai 153.130, dan mencapai pertumbuhan tertinggi *audience* di bulan Maret mencapai 158.189. Total *audience* pada *platform Instagram* mengalami pertumbuhan tertinggi dari bulan Januari ke bulan berikutnya yaitu sebanyak 102K, diikuti *Twitter* sebanyak 40K, *Facebook* sebanyak 13K, dan *Youtube* sebanyak 1.59K.

Total Audience Media Sosial Badan POM



Gambar 13. Total Aktivitas Media Sosial Badan POM s.d. Triwulan I Tahun 2020

Total Engagement Badan POM



Gambar 14. Total Engagement Badan POM s.d. Triwulan I Tahun 2020

Pada triwulan I tahun 2020, *engagement* tertinggi terjadi di bulan Maret terhadap semua *platform* media sosial yaitu sebanyak 68.462 *engagement*, disusul bulan Januari dengan *engagement* sebanyak 46.570 dan di bulan Februari dengan *engagement* 37.661.



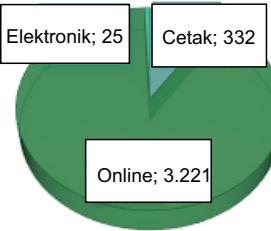
pom.go.id @bpom.official @bpom.id bpom.id Badan POM RI

Top Engagement Content pada *platform Facebook* terdapat pada konten Penyerahan empat unit insinerator ke Rumah Sakit Darurat Corona yang dipublikasikan pada 26 Maret 2020. Konten ini mendapat sebanyak 893 *engaged user* dengan *impression* sebesar 6.417 dan *reach* 5.697. Sementara *top engagement content* untuk *platform Instagram* terdapat pada konten Penjelasan Badan POM terkait Izin Produk Hand Sanitizer yang dipublikasikan pada 19 Maret 2020 dengan *likes* sebanyak 7.099, *comments* sebanyak 222, *share* sebanyak 4.050 dan konten yang disimpan sebanyak 989. Sehingga total *engagement* untuk konten ini adalah sebanyak 12.355.

Top engagement content pada platform Twitter terdapat pada tweet “Mengapa Sabun Lebih Efektif daripada Hand Sanitizer” yang mampu meraih 236 retweet dan 164 likes. Untuk platform Youtube, konten yang paling banyak dilihat adalah konten Pendampingan Pemerintah untuk UMKM Obat Tradisional, Kosmetik, dan Pangan dengan viewer mencapai 84.430.

Untuk memenuhi harapan masyarakat sekaligus untuk meningkatkan opini publik terhadap Badan POM, maka dilakukan pemantauan terhadap pemberitaan tentang Badan POM secara khusus maupun Obat dan Makanan secara umum di berbagai media, baik media cetak, media elektronik, media online, dan media sosial. Pemantauan pemberitaan tersebut dilakukan setiap hari setiap saat termasuk di hari libur.

PEMBERITAAN BERDASARKAN JENIS MEDIA



Gambar 15. Diagram Sebaran Pemberitaan Badan POM di Media TW I 2020

Berdasarkan jenis mediana, pemberitaan terkait Badan POM didominasi oleh pemberitaan melalui media *online*, yaitu sebanyak 3.221 berita (90,02%), dilanjutkan 332 berita (9,28%) melalui media cetak, dan 25 berita (0,70%) melalui media elektronik.

Selama triwulan I tahun 2020 terdapat 3 topik pemberitaan teratas yang ramai diberitakan oleh media:

1. Polisi grebek pabrik *stem cell* ilegal di Kemang.
2. Polisi bongkar pabrik kosmetik ilegal beromzet 200 juta/bulan di Depok.
3. Badan POM keluarkan surat edaran cara membuat hand sanitizer sesuai standar WHO.

Pemberitaan terkait Badan POM didominasi oleh pemberitaan netral dan positif. Ini menunjukkan bahwa masyarakat telah cukup mendapatkan informasi yang benar terkait Obat dan Makanan. Badan POM telah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik dilengkapi dengan penyebaran informasi yang luas mengenai Obat dan Makanan. Jumlah pemberitaan dengan tonasi positif berada di urutan kedua setelah pemberitaan bertonasi netral. Pada bulan februari (557 berita) menjadi bulan dengan jumlah tonasi terbesar dibandingkan bulan Januari (340 berita) dan maret (399 berita), hal ini disebabkan banyaknya kegiatan Badan POM yang melibatkan media dan juga terdapat beberapa program-program strategis Badan POM yang sedang gencar dilakukan pada bulan Februari tersebut.



Bulan	Positif	Netral	Negatif	Total
Januari	340	832	3	1.175
Februari	557	663	8	1.228
Maret	379	793	3	1.175

Gambar 16. Tabel Jumlah Pemberitaan tentang Badan POM selama TW I 2020

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan Triwulan I Tahun 2020



V. Digitalisasi Pelayanan Publik



b. 2D Barcode

Setelah lebih dari setahun diundangkannya Per BPOM No. 33 Tahun 2018 tentang Penerapan 2D Barcode dalam Pengawasan Obat dan Makanan, BPOM Mobile telah diunduh lebih dari 90.000 pengguna dengan aktivitas scan lebih dari 795.606 dan pengaduan lebih dari 6.502. Tercatat produk-produk yang telah mengimplementasikan 2D Barcode yaitu sebanyak 20 produk obat otentifikasi dan lebih dari 1.260 produk obat dan makanan mengimplementasikan identifikasi.

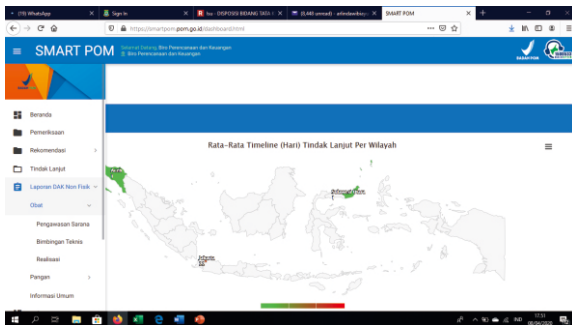
a. e-Sertifikasi Pelayanan BPOM

Aplikasi memuat seluruh layanan pengajuan GMP (CPOB, CPOTB, CPOOB, dan CPKB), yang telah terintegrasi dengan OSS. Pada Tahun 2020 ini dilakukan pengembangan kembali dengan berfokus pada pembuatan modul sertifikasi fasilitas bersama untuk industri farmasi dan pembuatan modul rekomendasi registrasi obat impor berdasarkan inspeksi.



c. SMART POM

Pada tahun 2020, dilakukan pengembangan Aplikasi SMART POM dengan penambahan menu Laporan DAK (Dana Alokasi Khusus) Non Fisik, yaitu alokasi anggaran dari Kementerian Keuangan dengan persetujuan DPR untuk digunakan oleh Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten dalam rangka meningkatkan kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Proses bisnisnya adalah, pengguna dinas Kesehatan memasukkan data hasil pengawasan sesuai kelompok formulir ke dalam aplikasi, dilakukan verifikasi oleh UPT (Balai / Loka) yang selanjutnya dilakukan evaluasi oleh unit-unit di pusat.



VI. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Sampai dengan triwulan I tahun 2020, telah ditetapkan 7 (tujuh) Peraturan Badan POM, 22 (dua puluh dua) Keputusan Kepala Badan POM, 35 (tiga puluh lima) Rumusan Perjanjian. Selain itu Badan POM telah melakukan pembahasan 1 (satu) Rancangan Undang-Undang dan 2 (dua) Rancangan Peraturan Pemerintah. Bersama dengan Kementerian Kesehatan, Badan POM turut serta dalam pembahasan RPP tentang Revisi PP 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

1 Judul RUU



Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan

2 Judul RPP



1. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan

7 Judul Peraturan Badan POM



1. Peraturan Badan POM Nomor 1 tahun 2020 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 Tentang Kosmetik
2. Peraturan Badan POM Nomor 2 tahun 2020 Tentang Pengawasan Produksi Dan Peredaran Kosmetika
3. Peraturan Badan POM Nomor 3 tahun 2020 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Subbidang Pengawasan Obat Dan Makanan Terpadu
4. Peraturan Badan POM Nomor 4 tahun 2020 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan BPOM
5. Peraturan Badan POM Nomor 5 tahun 2020 Tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Sektor Obat Dan Makanan
6. Peraturan Badan POM Nomor 6 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat Yang Baik

VII. Penguatan dan Penataan Organisasi dan Tata Laksana

a. Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan BPOM

Untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. BPOM telah melakukan pemetaan dan identifikasi pengalihan jabatan administrasi yang terdiri atas Pejabat Administrator (eselon III) dan Pejabat Pengawas (eselon IV) melalui penyetaraan ke dalam jabatan fungsional dalam rangka penyederhanaan birokrasi sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Hasil penyederhanaan birokrasi BPOM disampaikan ke Menteri PANRB melalui Surat Kepala BPOM tanggal 6 Januari 2020 hal Penyampaian Usulan Penyederhanaan Jabatan Administrasi di Lingkungan BPOM.

Usulan penyederhanaan jabatan administrasi di lingkungan BPOM telah mendapat persetujuan Menteri PANRB melalui Surat Sekretaris Kementerian PANRB Nomor B/171/M.SM.02.00/2020 tanggal 27 Maret 2020 hal Persetujuan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional di lingkungan BPOM, sebagai berikut:

No.	Jabatan Administrasi	Jumlah Jabatan Yang Diusulkan untuk Disetarakan	Jumlah Penyetaraan Jabatan Fungsional Yang Disetujui
1.	Administrator (Eselon III)	147	138
2.	Pengawas (Eselon IV)	378	366

Surat persetujuan dari Kementerian PANRB ini merupakan pertimbangan untuk mengangkat dan melantik Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional yang telah ditetapkan di lingkungan BPOM sesuai dengan tugas dan fungsi serta kedudukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Evaluasi dan Penataan Organisasi BPOM

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 384 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan penataan organisasi BPOM. Berkenaan dengan hal tersebut, BPOM telah melakukan evaluasi dan penataan organisasi dan tata kerja yang meliputi Unit Kerja BPOM Pusat, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar, Balai, dan Loka POM, serta UPT di lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan BPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM.
2. Rancangan Peraturan BPOM tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan BPOM.
3. Rancangan Peraturan BPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional BPOM.
4. Rancangan Peraturan BPOM tentang Uraian Fungsi Organisasi UPT dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional UPT di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional BPOM.
5. Rancangan Peraturan BPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan BPOM.
6. Rancangan Peraturan BPOM Uraian Fungsi UPT dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional UPT di Lingkungan BPOM.

Usulan penataan organisasi dan tata kerja BPOM tersebut telah dilakukan pembahasan dengan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB tanggal 10 Maret 2020, dan masih memerlukan pembahasan lanjutan untuk finalisasi.

c. Implementasi QMS ISO 9001:2015 di Badan POM

Menindaklanjuti Pasal 43 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Proses Bisnis di Instansi Pemerintah, BPOM telah melakukan tinjau ulang proses bisnis dan SOP Makro untuk tahun 2020 yang dimulai dari Minggu II Januari sampai Minggu IV Februari 2020. Berdasarkan hasil tinjau ulang tersebut diperoleh:

Tata Laksana	Saat Ini	Menjadi
Peta Proses Bisnis	16	16
Peta Subproses	36	36
Peta Lintas Fungsi	56	55
SOP Makro	81	83

Sosialisasi hasil tinjau ulang Proses Bisnis dan SOP Makro dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2020 dipimpin Plt. Sekretaris Utama dan dihadiri oleh Pejabat Tinggi Madya dan Pratama serta Manajemen Representatif dan Auditor Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM melalui *video conference*. Selain itu, untuk menjamin komitmen tersebut dapat terlaksana maka dilakukan kegiatan Peningkatan pemahaman dan persamaan persepsi Manajemen Representatif seluruh unit kerja di lingkungan BPOM. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 12 s.d 13 Maret 2020 di Jakarta.



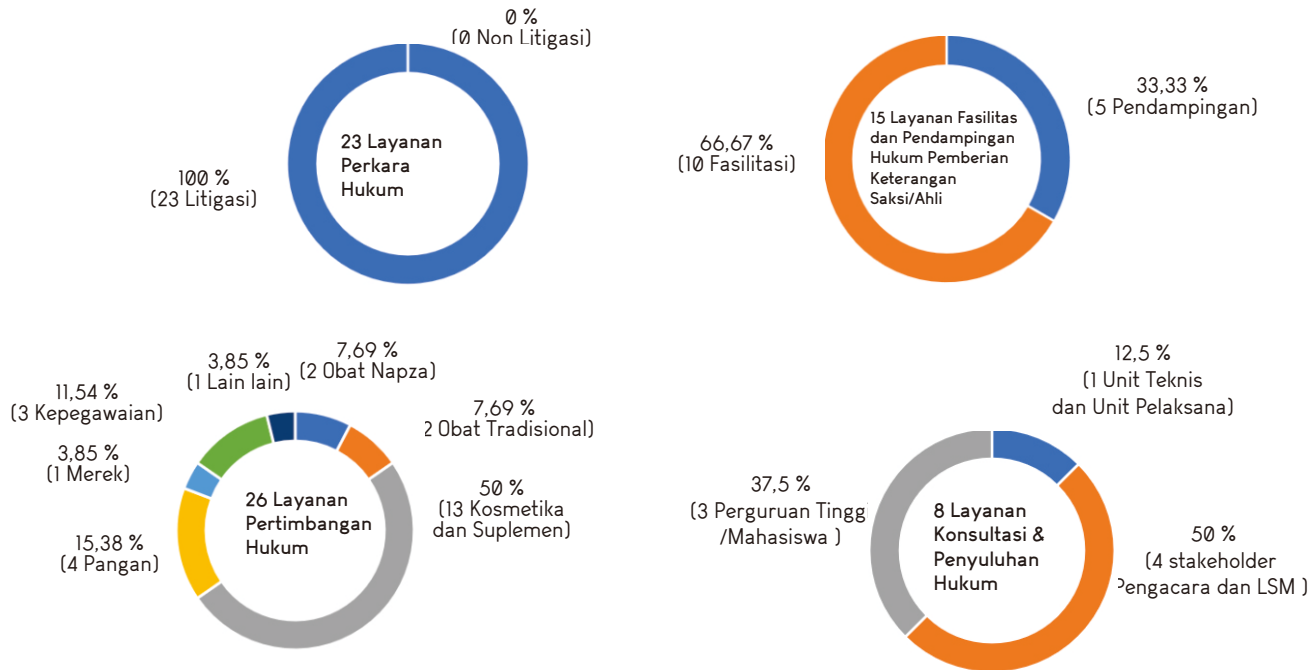
Kegiatan dibuka Plt. Sekretaris Utama dan dihadiri Koordinator Manajemen Representatif BPOM dan Manajemen Representatif seluruh Unit Kerja di lingkungan BPOM. Pada kesempatan ini Sekretariat Koordinator Manajemen Representatif melakukan diskusi panel untuk materi Sosialisasi Penerapan Manual Organisasi Integrasi ISO 9001:2015 dengan ISO 17025:2017, Sosialisasi Dokumen Pedoman Teknis Laboratorium dan Evaluasi Pelaksanaan Subsiste Manajemen Mutu di BPOM serta Evaluasi Persiapan sertifikasi untuk 19 (sembilan belas) Loka POM.

VIII. Layanan Advokasi Hukum (Pelayanan Hukum)

Peran unit kerja yang membidangi hukum/legal pada setiap Instansi Pemerintah terkait pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas di lingkungan pemerintahan adalah sebagai unit kerja yang mendukung dalam aspek hukum, agar pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak menimbulkan implikasi hukum yang berisiko bagi organisasi. Dukungan aspek hukum dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas BPOM diberikan oleh Biro Hukum dan Organisasi berupa Layanan Advokasi Hukum yang terdiri dari pelaksanaan pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara hukum, pelaksanaan pendampingan kepada saksi/ahli serta pelaksanaan konsultasi dan penyuluhan hukum.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2020

Jumlah layanan advokasi hukum yang diberikan sejumlah 72 layanan yang terdiri dari :

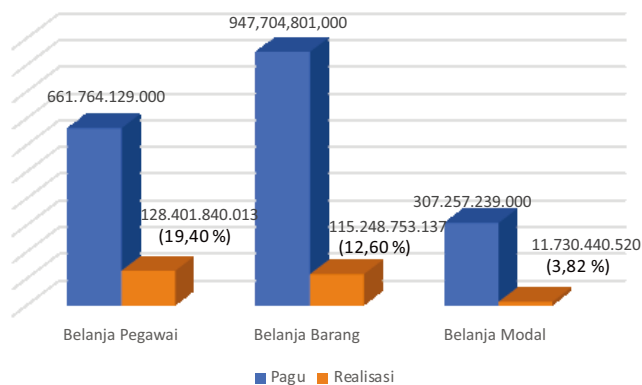
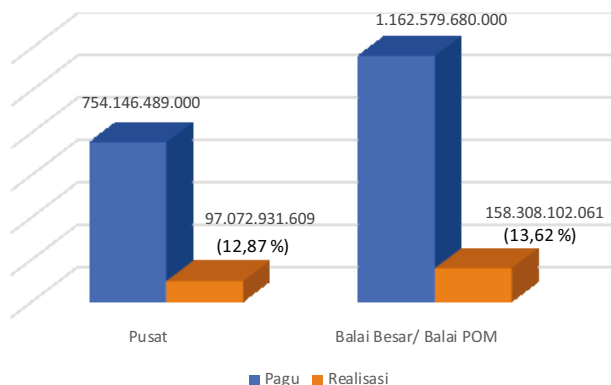


IX. Kerjasama di Dalam dan Luar Negeri

Kerjasama yang dilakukan BPOM sampai dengan Triwulan I 2020, adalah : **Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) Badan POM dengan Kementerian Pertanian.** Sebagai upaya akselerasi ekspor komoditas strategis yang bermuara pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan petani, Kementerian Pertanian dan Badan POM menandatangani Kesepakatan Bersama (MoU) tentang Pengawasan Obat, Obat Hewan dan Pangan dalam rangka Peningkatan Keamanan, Mutu, dan Daya Saing Produk Pertanian. Penandatanganan dilakukan di Jakarta, tanggal 27 Januari 2020 pada acara Pembukaan Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian Tahun 2020. Kerja sama ini menitikberatkan pada penguatan Pengawasan Obat, Obat Hewan dan Pangan dalam rangka Peningkatan Keamanan dan Daya Saing Produk Pertanian. MoU ini merupakan perpanjangan dari kerja sama sebelumnya mengenai Peningkatan Jaminan Keamanan, Mutu dan Daya Saing Pangan Olahan Hasil Peternakan yang ditandatangani pada tahun 2016. Badan POM telah memberikan bimbingan teknis kepada Unit Pengolahan Hasil (UPH) Peternakan dalam memenuhi persyaratan izin edar untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Melalui kerja sama ini, diharapkan dapat meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat, serta daya saing produk pertanian yang pada akhirnya bermuara pada pertumbuhan ekonomi dan juga mencakup pemenuhan pangan dan pertanian, guna mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat.

X. Pengelolaan Anggaran

Pada tahun 2020, BPOM mendapat anggaran sebesar Rp1.916.726.169.000,- untuk seluruh kegiatan di pusat maupun daerah. Anggaran tersebut terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal yang tersebar di 10 Satker Pusat dan 33 Balai Besar/Balai POM. Realisasi anggaran Triwulan I tahun 2020 sebesar Rp255.381.033.670,- (13,32%) yang terdiri dari realisasi anggaran untuk 10 Satker Pusat Rp97.072.931.609,- dan realisasi anggaran untuk seluruh Balai Besar/Balai POM Rp158.308.102.061,-.



XI. Pemantauan Capaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BPOM

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, BPOM secara rutin telah melakukan pemantauan pelaksanaan RKP BPOM Tahun 2020. Pemantauan dilakukan terhadap perkembangan realisasi anggaran serta realisasi pencapaian sasaran kegiatan dan pencapaian sasaran program dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, juga kendala yang dihadapi untuk dapat segera diidentifikasi upaya tindak lanjut yang dibutuhkan. Pemantauan capaian RKP dilakukan per triwulan. Hasil pemantauan capaian RKP sampai dengan Triwulan I tahun 2020 sebagaimana terlampir pada buku ini.

PENUTUP

Kinerja yang ditampilkan dalam laporan ini hanya sebagian dari kinerja keseluruhan BPOM. Namun demikian para pihak terkait diharapkan mendapat gambaran jelas bahwa program dan kegiatan BPOM berorientasi pada pencapaian tujuan utama pembangunan pengawasan obat dan makanan 2020-2024 yaitu meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut BPOM akan terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya pada masa mendatang, dengan mengutamakan niat baik, komitmen, keterbukaan, perencanaan yang komprehensif (termasuk anggaran), pelaksanaan aksi, evaluasi dan analisis hasil, serta *continuous improvement*.

LAMPIRAN I

CAPAIAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2020

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM	Nilai RB BPOM	80,00	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai AKIP BPOM	80,00	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN BPOM	68,00	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	81,00	%	64,50	79,63
		Indeks SPBE BPOM	3,00	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP		capaian pada TW II	capaian pada TW II
		Nilai kinerja anggaran BPOM	91,60	Nilai	36,17	39,49
1.1	Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Badan POM	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerjasama	81,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti atau diimplementasikan	72,00	%	akhir tahun	akhir tahun
		Jumlah rekomendasi penguatan regulatori yang diterapkan oleh negara penerima KSS Badan POM	2,00	Rekomendasi	akhir tahun	akhir tahun
		Penyiapan dokumen kerja sama yang diselesaikan tepat waktu	81,00		akhir tahun	akhir tahun
		Persentase naskah kerja sama yang diselesaikan tepat waktu	81,00	%	akhir tahun	akhir tahun
		Jumlah dokumen kerja sama Badan POM	84,00	Dokumen	27	32,14
		Jumlah negara selatan-selatan penerima program KSS mengenai penguatan fungsi regulatori	2,00	negara	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai RB Biro Kerja Sama	81,00	Nilai	akhir tahun	akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Nilai AKIP Biro Kerja Sama	81,00	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Biro Kerja Sama	75,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase SDM Biro Kerja Sama yang memenuhi standar kompetensi	81,00	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase pengelolaan TIK Biro Kerja Sama yang baik	70,00	%	0	0,00
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Kerja Sama	90,00	Nilai	0	0,00
1.2	Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	Nilai RB BPOM Penguatan akuntabilitas	4,90	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM	73,00	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)	93,00	Nilai	5,195	5,59
		Persentase kesesuaian Laporan Keuangan yang disusun dengan Standara Akuntansi Pemerintahan	100,00	%	25	25,00
		Nilai kinerja pelaksanaan anggaran	94,25	Nilai	95,85	101,70
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	81,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase kesesuaian dokumen perencanaan kinerja satker terhadap pedoman	85,00	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase dokumen perencanaan, yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar	100,00	%	akhir tahun	akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase satker yang memperoleh nilai kinerja anggaran minimal 95 berdasarkan mekanisme reward dan punishment berdasarkan mekanisme reward and	20,90	%	20,9	100,00
		Persentase dokumen penganggaran yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar	100,00	%	40	40,00
		Persentase unit kerja yang melaporkan capaian kinerja dan anggaran sesuai pedoman	57,00	%	95,51	167,56
		Persentase dokumen monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	100,00	%	26,67	26,67
		Persentase satker yang memperoleh nilai kinerja pelaksanaan anggaran minimal Baik	80,00	%	53,49	66,86
		Persentase dokumen laporan keuangan satker yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar	100,00	%	25	25,00
		Persentase laporan PNB unit kerja yang disampaikan tepat waktu	95,00	%	95,35	100,37
		Indeks RB Biro Perencanaan dan Keuangan	85,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai AKIP Biro Perencanaan dan Keuangan	81,00	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan dan Keuangan	75,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase pengelolaan TIK Biro Perencanaan dan Keuangan yang baik	1,51	%	0	0,00
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan	100,00	Nilai	100	100,00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
1.3	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana	Nilai RB BPOM Penataan peraturan perundang-undangan	3,00	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai RB BPOM Penataan dan penguatan organisasi	4,30	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai RB BPOM penataan tata laksana	4,30	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Pelayanan Publik Biro Hukum dan Organisasi	3,30	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan tata laksana yang ditindaklanjuti	100,00	%	12,50	12,50
		Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	100,00	%	60,38	60,38
		Persentase advokasi hukum yang diselesaikan	100,00	%	100,00	100,00
		Indeks RB Biro Hukum dan Organisasi	81,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai AKIP Biro Hukum dan Organisasi	81,00	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN	77,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase pengelolaan TIK yang baik	70,00	%	0,00	0,00
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	95,00	Nilai	85,00	89,47
1.4	Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	79,50	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks kepuasan media	73,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks opini publik BPOM	66,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro HDSP	74,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Tingkat efektivitas KIE obat dan makanan yang dilaksanakan oleh Biro HDSP	70,00	Indeks	0,00	0,00
		Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,59	Indeks	99,61	100,02
		Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	95,00	%	98,89	104,09
		Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan manajemen eselon I	75,00	Nilai	83,52	111,36
		Indeks RB Biro HDSP	81,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai AKIP Biro HDSP	81,00	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Biro HDSP	77,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro HDSP yang baik	70,00	%	0,00	0,00
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro HDSP	88,00	Nilai	80,00	90,91
1.5	Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM	Nilai RB BPOM Penataan Sistem Manajemen SDM	13,22	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai Pengelolaan BMN BPOM	74,00	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks layanan rumah tangga	3,25	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks layanan kepegawaian	3,22	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase ASN BPOM yang memiliki kinerja berkriteria minimal baik	85,00	%	99,98	117,62

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase ASN BPOM yang ditingkatkan kariernya sesuai pedoman pola karir	73,00	%	capaian TW II	akhir tahun
		Persentase Satker yang mampu mengelola BMN dengan baik	89,00	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang kinerja pengawasan Obat dan Makanan sesuai standar	75,00	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase unit kerja yang mampu mengelola arsip dengan baik sesuai standar pengelolaan kearsipan	86,00	%	10,50	12,21
		Indeks RB Biro Umum dan SDM	81,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai AKIP Biro Umum dan SDM	81,00	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas SDM Biro Umum dan SDM	75,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase pengelolaan TIK Biro Umum SDM yang baik	70,00	%	0,00	0,00
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran di Biro Umum dan SDM	efisien	Nilai	38,00	akhir tahun
1.6	Pengembangan SDM Aparatur Badan POM	Persentase SDM POM yang memenuhi Standar Kompetensi	75,00	%	64,50	86,00
		Nilai RB Badan POM Manajemen Perubahan	4,00	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Jumlah SDM POM tersertifikasi sesuai Standar	770,00	SDM	770,00	100,00
		Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM	40,00	%	4,13	10,33
		Jumlah Kerja Sama Pengembangan Kompetensi yang ditindaklanjuti	10,00	Kerja Sama	0,00	0,00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Nilai kepuasan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi	4,35	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase SDM POM yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan Pengembangan Kompetensi	90,00	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase realisasi rencana aksi RB Badan POM terkait Manajemen Perubahan	86,00	%	0,00	0,00
		Indeks RB PPSDM POM	88,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai AKIP PPSDM POM	81,00	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM	75,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase pengelolaan TIK PPSDM POM yang baik	70,00	%	0,00	0,00
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di PPSDM POM yang optimal	70,00	indeks	0,00	0,00
		Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM	91,60	Nilai	0,00	0,00
		Tingkat Efisiensi penggunaan Anggaran PPSDM POM	90,00	Nilai	0,00	0,00
1.7	Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan	Indeks SPBE Badan POM	2,80	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase Layanan TIK Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Real Time	35,00	%	16,67	47,62
		Persentase Kepuasan Layanan TIK	70,00	%	75,25	107,50
		Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Badan POM	Baseline +2	%	100,00	100,00
		Persentase Kerjasama pada Bidang IT yang ditindaklanjuti	100,00	%	100,00	100,00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Sertifikasi ISO 27001	1,00	Sertifikasi	Progres 16,67%	16.67
		Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu	100,00	%	100,00	100,00
		Persentase Pemenuhan Bussines Continuity Management	15,00	%	0,00	0,00
		Persentase Sistem Informasi POM yang dikembangkan sesuai Roadmap TIK	100,00	%	10,00	10,00
		Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK	100,00	%	50,00	50,00
		Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir	100,00	%	22,14	22,14
		Indeks RB Pusdatin	81,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai AKIP Pusdatin	81,00	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Pusdatin	77,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase Pengelolaan TIK yang Baik	70,00	%	0,00	0,00
		Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, dan Data	89,00	%	Progres 6,10%	6,10
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	88,00	Nilai	95,00	107,95
2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	9,20	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	81,00	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase Pemenuhan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM	40,00	%	akhir tahun	akhir tahun
		Kualitas Laporan keuangan BPOM	WTP	Nilai	capaian pada TW II	capaian pada TW II

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	88,00	%	capaian pada TW II	capaian pada TW II
2.1	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	9,20	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai rata-rata evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat I	81,00	Nilai	capaian pada TW II	capaian pada TW II
		Persentase Pemenuhan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM	40 level 4	%	capaian pada TW II	capaian pada TW II
		Persentase Pemenuhan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mitra kerja Inspektorat I	100,00	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase Rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti	75,00	%	capaian pada TW III	capaian pada TW III
		Kualitas Laporan Keuangan BPOM Mitra Kerja Inspektorat I	100,00		100,00	100,00
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	88,00	%	capaian pada TW II	capaian pada TW II
		Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Mitra Kerja Inspektorat I	82,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase perencanaan pengawasan intern Inspektorat I berbasis risiko sesuai pedoman	100,00	%	100,00	100,00
		Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat I yang sesuai standar mutu	22,00	Laporan	5,00	22,73
		Nilai peer review terhadap pengawasan intern Inspektorat I yang sesuai standar	65,00	Nilai	capaian pada TW III	capaian pada TW III

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Intern Inspektorat I yang ditindaklanjuti	90,00	%	87,53	97,25
		Persentase Hasil Penelusuran Pengaduan Lingkup Inspektorat I yang ditindaklanjuti	60,00	%	33,33	55,56
		Nilai PMPRB Utama lingkup Inspektorat I	81,00	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai AKIP Inspektorat I	81,00	Nilai	capaian pada TW II	capaian pada TW II
		Indeks Profesionalisme ASN Inspektorat I	75,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase ASN Inspektorat I yang memenuhi standar kompetensi	81,00	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase pengelolaan TIK Inspektorat I yang baik	70,00	%	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai kinerja anggaran Inspektorat I	91,60	Nilai	0,00	0,00
		Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat I	88,00	%	0,00	0,00
2.2	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Nilai RB BPOM Penguatan Sistem Pengawasan	9,20	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai rata rata evaluasi AKIP mitra kerja inspektorat II	81,00	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase pemenuhan maturitas SPIP BPOM	40 level 4	%	0,00	0,00
		Persentase pemenuhan maturitas SPIP mitra kerja Inspektorat II	100,00	%	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai rata-rata Indeks RB unit kerja BPOM	87,00	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		kualitas laporan keuangan BPOM mitra kerja Inspektorat II	100,00	%	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja inspektorat II	82,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Nilai AKIP Inspektorat II	81,00	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase pemenuhan elemen kapabilitas Ittama	40 level 4	%	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks profesionalitas ASN Inspektorat II	77,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase SDM Inspektorat II yang memenuhi standar kompetensi	81,00	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase pengelolaan TIK Inspektorat II yang baik	70,00	%	0,00	0,00
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat II	88,00	%	0,00	0,00
3	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kemanfaatan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	70,00	indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase obat yang memenuhi syarat	89,00	%	93,60	105,17
		Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	70,70	%	83,84	118,59
		Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	88,80	%	93,13	104,88
		Persentase kosmetik yang memenuhi syarat	73,00	%	82,19	112,59
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	78,00	%	73,65	94,42
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh Stakeholder	55,00	%	31,57	57,40
		Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	70,00	%	capaian pada TW II	capaian pada TW II
		Persentase perkara di bidang Obat dan Makanan yang memperoleh putusan pengadilan dan dinyatakan bersalah	30,00	%	0,00	0,00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks efektifitas kebijakan pengawasan intern bidang reformasi dalam rangka ZI WBK/WBBM	100,00	Indeks	0,00	0,00
		Persentase perencanaan pengawasan intern inspektorat II berbasis risiko sesuai pedoman	100,00	%	akhir tahun	akhir tahun
		jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja inspektorat II yang sesuai standar mutu	22,00	Laporan	7,00	31,82
		nilai peer review terhadap pengawasan intern inspektorat II yang sesuai standar	65,00	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan intern inspektorat II yang ditindaklanjuti Unit Kerja	90,00	%	82,49	91,66
		Persentase rekomendasi penelusuran pengaduan lingkup inspektorat II yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60,00	%	50,00	83,33
		persentase temuan audit internal ISO 9001:2015 yang ditindaklanjuti oleh unit kerja	100,00	%	0,00	0,00
		Persentase rekomendasi hasil monev pelaksanaan RB yang ditindaklanjuti pokja tim RB	100,00	%	0,00	0,00
		Persentase rekomendasi hasil reviu PMPRB yang ditindaklanjuti unit kerja eselon I	100,00	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase rekomendasi survei integritas organisasi dan jabatan yang ditindaklanjuti unit kerja	88,00	%	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai RB Satker Ittama lingkup Inspektorat II	81,00	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai RB Inspektorat II	81,00	Nilai	0,00	0,00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
3.1	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Persentase obat yang memenuhi syarat	89,10	%	93,60	105,05
		Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	70,70	%	83,84	118,59
		Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	88,80	%	93,13	104,88
		Persentase kosmetik yang memenuhi syarat	73,00	%	82,19	112,59
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	78,00	%	73,65	94,42
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46,00	%	43,05	93,59
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	55,00	%	62,42	113,49
		Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing masing wilayah kerja BB/BPOM	70,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	74,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan Obat dan Makanan	71,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	84,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87,00	%	74,68	85,84
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	55,00	%	31,57	57,40

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,00	%	95,95	112,88
		Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di masing masing wilayah kerja BB/BPOM	70,00	%	capaian pada TW II	capaian pada TW II
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	660,00	Sekolah	Progres 4,39%	4,39
		Jumlah desa pangan aman	211,00	desa	Progres 3,73%	3,73
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	80,00	pasar	Progres 4,02%	4,02
		Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	100,00	%	26,51	26,51
		Persentase sampel obat dan makanan yang selesai diuji tepat waktu	92,00	%	87,08	94,65
		Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	50,00	%	20,24	40,48
		Indeks RB BB/BPOM	81,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai AKIP BBPOM/BPOM	81,00	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN BBPOM/BPOM	77,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase pengelolaan TIK BBPOM/BPOM yang baik	70,00	%	capaian pada TW II	capaian pada TW II
		Nilai Kinerja Anggaran BBPOM/BPOM	93,40	Nilai	42,55	45,56
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM/BPOM	100,00	Nilai	80,00	80,00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
3.2	Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	Persentase kajian kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	60,00	%	Pogres 18%	18,00
		Persentase kegiatan pengamanan penindakan yang efektif	80,00	%	progres 16,67%	16,67
		Persentase kajian strategis kejahatan Obat dan Makanan yang diselesaikan sesuai perencanaan	33,00	%	Progres 18%	18,00
		Persentase data kerawanan kejahatan yang terverifikasi	83,00	%	91,51	110,26
		Persentase kajian taktis kejahatan Obat dan Makanan yang terselesaikan tepat waktu	50,00	%	Progres 15%	15,00
		Persentase kegiatan pengamanan dalam rangka penindakan yang terlaksana sesuai perencanaan	60,00	%	10,00	16,67
		Indeks RB Direktorat Pengamanan	81,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai AKIP Direktorat Pengamanan	81,00	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengamanan	77,00	indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase pengelolaan TIK Direktorat Pengamanan yang baik	70,00	%	0,00	0,00
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengamanan	88,00	%	0,00	0,00
3.3	Intelijen Obat dan Makanan	Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	75,00	%	90,00	120,00
		Persentase laporan informasi yang sesuai standar	75,00	%	62,30	83,06
		Presentase laporan Intelijen yang Sesuai Standar	75,00	Profil	85,71	114,29
		Presentase hasil patroli siber yang efektif	55,00	%	46,00	83,64

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Jumlah profil jaringan kejahatan Obat dan Makanan yang terpetakan	2,00	Profil	0,00	0,00
		Indeks RB Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	81,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai AKIP Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	81,00	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks profesionalisme ASN Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	68,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase pengelolaan TIK Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang baik	70,00	%	0,00	0,00
		Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Intelijen	88,00	%	0,00	0,00
3.4	Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	Persentase sarana Produksi Obat Tradisional yang memenuhi persyaratan CPOTB	77,00	%	72,22	93,80
		Persentase UMKM Obat Tradisional yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap	83,30	%	92,64	111,21
		Persentase iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	62,00	%	45,95	74,12
		Persentase pemenuhan pedoman pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan oleh Balai/ Balai Besar POM	80,00	%	86,30	107,88
		Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	86,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase keputusan hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	73,00	%	75,06	102,82

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti	72,00	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase laporan keamanan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti tepat waktu	92,00	%	100,00	108,70
		Persentase UMKM Obat Tradisional yang diintervensi dalam pemenuhan CPOTB	95,00	%	58,00	61,05
		Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	60,00	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase permohonan penilaian sarana dan produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	88,00	%	86,71	98,53
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	88,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai AKIP Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	81,00	nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	75,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase pengelolaan TIK Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang baik	1,51	%	0,00	0,00
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	99,00	%	0,00	0,00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
3.5	Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	Persentase industri pangan olahan yang menerapkan Program Manajemen Risiko	17,00	%	15,68	92,24
		Persentase Sarana Ritel Modern yang menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan	10,00	%	0,00	0,00
		Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	79,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase pemenuhan Pelaksanaan pedoman pengawasan Pangan Olahan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru oleh Balai/Balai Besar POM	65,00	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase Keputusan penilaian sarana Produksi Pangan Olahan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru yang di selesaikan tepat waktu	80,00	%	100,00	125,00
		Persentase tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap pembinaan sarana produksi dan sarana distribusi Pangan Olahan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru yang diberikan	81,00	%	0,00	0,00
		Persentase Keputusan hasil pengawasan pangan risiko tinggi dan teknologi baru yang diselesaikan tepat waktu	85,00	%	87,00	102,35
		Persentase Sarana produksi dan sarana distribusi yang diinspeksi dalam rangka pendalaman mutu hasil pengawasan pangan risiko tinggi dan teknologi baru	85,00	%	10,00	11,76
		Persentase tindak lanjut pengawasan pangan risiko tinggi dan teknologi baru yang dilaksanakan oleh mitra pengawas dan Pelaku usaha	45,00	%	41,37	91,93

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase laporan KLB KP yang terverifikasi	80,00	%	0,00	0,00
		Persentase insiden/kasus keamanan pangan yang ditindaklanjuti	85,00	%	capaian pada TW II	capaian pada TW II
		Persentase Sarana Produksi yang diverifikasi dalam rangka Penerapan Program Manajemen Risiko	25,00	%	0,00	0,00
		Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan Kualitas Pengawasan Pangan Olahan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	59,00	%	0,00	0,00
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	81,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai AKIP Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	81,00	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	77,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase Pengelolaan TIK Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru yang baik	70,00	%	0,00	0,00
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru yang baik	88,00	%	0,00	0,00
3.6	Pengawasan Kosmetik	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Kosmetik	83,50	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase pemenuhan ketentuan pengawasan kosmetik oleh Balai Besar/Balai POM/Loka POM	63,00	%	82,94	131,65

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase Sarana Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan	65,00	%	64,66	99,48
		Persentase UMKM Kosmetik yang Menerima Sertifikat CPKB	85,00	%	86,49	101,75
		Persentase Iklan Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan	85,00	%	82,63	97,21
		Persentase Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetik yang Diselesaikan Tepat Waktu	65,00	%	81,10	124,77
		Persentase Hasil Pengawasan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Pelaku usaha/Stakeholder	60,00	%	63,92	106,54
		Persentase Laporan Keamanan Kosmetik yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu	68,00	%	50,64	74,47
		Persentase UPT yang di Lakukan Supervisi dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pengawasan Kosmetik	60,00	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang di selesaikan tepat waktu	90,00	%	94,55	105,06
		Indeks pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik	3,51	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase UMKM kosmetik yang di fasilitasi dalam pemenuhan CPKB	38,00	%	44,58	117,31
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Kosmetik	85,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai AKIP Direktorat Pengawasan Kosmetik	81,00	nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Kosmetik	75,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal	1,51	Indeks	0,00	0,00
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik	100,00	%	0,00	0,00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
3.7	Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Persentase keputusan hasil pengawasan di bidang distribusi dan pelayanan obat yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	65,00	%	66,28	101,97
		Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang distribusi obat	87,50	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pelayanan publik di bidang distribusi obat	88,50	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase pemenuhan standar pengawasan sarana distribusi dan pelayanan obat oleh Balai	65,00	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian yang diselesaikan	80,00	%	79,27	99,09
		Persentase Keputusan Penilaian Sarana Distribusi Obat yang Diselesaikan tepat waktu	78,00	%	83,61	107,19
		Indek RB Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	90,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai AKIP Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	81,00	nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	75,00	indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Dit. Was. Distribusi dan Pelayanan ONPP yang optimal	1,51	Indeks	0,00	0,00
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran di Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	88,00	%	0,00	0,00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
3.8	Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan iklan obat dan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika dan prekursor	82,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase pemenuhan standar pengawasan obat dan produk tembakau oleh Balai	88,50	%	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Kepatuhan industri Produk Tembakau	46,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase permohonan iklan obat yang diselesaikan tepat waktu	70,00	%	96,84	138,34
		Persentase permohonan ekspor impor Obat dan NPP yang diselesaikan tepat waktu	95,00	%	98,21	103,38
		Persentase laporan Farmakovigilans yang ditindaklanjuti	70,00	%	73,83	105,47
		Persentase laporan pengawasan mutu, label dan iklan obat dan NPP yang ditindaklanjuti	86,00	%	36,11	41,98
		Jumlah label dan iklan produk tembakau yang diawasi yang memenuhi ketentuan	60.000,00	label dan iklan	14444,00	24,07
		Nilai RB Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	81,00	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai AKIP Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	81,00	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	77,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase Pengelolaan TIK Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang baik	70,00	%	0,00	0,00
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	98,00	%	0,00	0,00
3.9	Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan pangan olahan	54,00	%	0,00	0,00
		Persentase hasil pengawasan UPT BPOM yang dilakukan sesuai standar	65,00	%	0,00	0,00
		Persentase sarana produksi dan distribusi pangan olahan risiko rendah dan sedang yang dilakukan pendalam mutu, dan memenuhi ketentuan	50,00	%	43,42	86,84
		Persentase sampel pangan fortifikasi yang diambil dan memenuhi syarat	87,00	%	82,91	95,30
		Indeks Kepuasan Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang	81,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Pengawasan Pangan Olahan sesuai standar	50,00	Kab/Kota	0,00	0,00
		Persentase pembinaan UPT BPOM yang dilakukan sesuai kriteria	75,00	%	0,00	0,00
		Persentase keputusan hasil pengawasan risiko rendah dan sedang yang diselesaikan sesuai standar	93,00	%	100,00	107,53
		Persentase tindaklanjut hasil pengawasan pangan risiko rendah dan sedang yang dilaksanakan oleh lintas sektor/mitra pengawas	45,00	%	0,00	0,00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase hasil Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang yang ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha	60,00	%	24,70	41,16
		Persentase iklan pangan olahan yang memenuhi ketentuan	50,00	%	71,69	143,38
		Persentase permohonan ekspor/impor yang diselesaikan tepat waktu	95,00	%	100,00	105,26
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang	81,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai AKIP Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang	81,00	nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang	73,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang	70,00	%	0,00	0,00
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang yang baik	92,00	%	0,00	0,00
3.10	Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Persentase sarana produksi obat yang mandiri dalam pemenuhan CPOB	50,00	%	59,09	118,18
		Indeks Kepuasan Pelayanan Publik di bidang pengawasan sarana produksi obat	82,00	Indeks	0,00	0,00
		Persentase sarana produksi obat JKN, Bahan Baku Obat, dan obat highrisk lainnya yang memenuhi persyaratan CPOB	72,00	%	78,95	109,65
		Persentase tindak lanjut yang berkualitas dari hasil pengawasan sarana produksi di Balai	90,00	%	22,22	24,69

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase fasilitas produksi produk JKN dan produk highrisk lainnya serta Bahan Baku Obat yang diawasi sesuai standar	84,00	%	17,21	20,49
		Persentase hasil pengawasan sarana produksi yang ditindaklanjuti	72,00	%	75,00	104,17
		Persentase keputusan penilaian fasilitas produksi Bahan Baku Obat, obat, produk biologi, dan sarana khusus yang diselesaikan tepat waktu	65,00	%	56,86	87,48
		Persentase inovasi pengembangan obat yang diterbitkan keputusan pada tahapan pemenuhanfasilitas produksi	35,00	%	35,00	100,00
		Nilai RB Direktorat Pengawasan Produksi ONPP	81,00	nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai AKIP Direktorat Pengawasan Produksi ONPP	81,00	nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Produksi ONPP	77,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase pengelolaan TIK Direktorat Pengawasan Produksi ONPP yang baik	70,00	%	0,00	0,00
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Produksi ONPP	95,00	%	0,00	0,00
3.11	Registrasi Pangan Olahan	Persentase pangan olahan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan	80,00	%	69,19	86,49
		Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	80,00	Indeks	0,00	0,00
		Persentase keputusan registrasi Pangan Olahan yang diselesaikan tepat waktu	95,00	%	99,64	104,88

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase pengaduan terkait registrasi Pangan Olahan yang ditindaklanjuti	100,00	%	100,00	100,00
		Persentase pendampingan di bidang registrasi pangan olahan yang efektif	75,00	%	98,01	130,68
		Persentase deregulasi dan debirokratisasi di bidang registrasi pangan olahan dibanding dengan yang direncanakan	20,00	%	0,00	0,00
		Indeks RB Direktorat Registrasi Pangan Olahan	81,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai AKIP Direktorat Registrasi Pangan Olahan	81,00	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi Pangan Olahan	77,00	Indeks	0,00	0,00
		Persentase pengelolaan TIK Direktorat Registrasi Pangan Olahan yang baik	70,00	%	0,00	0,00
		Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Registrasi Pangan Olahan	88,00	%	0,00	0,00
3.12	Registrasi Obat	Persentase obat yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan	70,00	%	68,34	97,63
		Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang registrasi Obat	81,00	Indeks	0,00	0,00
		Persentase keputusan registrasi obat yang diselesaikan tepat waktu	70,00	%	83,79	119,70
		Persen pengaduan/keluhan/masukan terkait registrasi Obat yang ditindaklanjuti	100,00	%	100,00	100,00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase sarana UK/Lab BE yang diinspeksi dan memenuhi CUKB	78,00	%	20,00	25,64
		Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar registrasi obat	40,00	%	100,00	250,00
		Indeks RB Direktorat Registrasi Obat	81,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai AKIP Direktorat Registrasi Obat	81,00	nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi Obat	77,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase pengelolaan TIK Direktorat Registrasi Obat yang baik	70,00	%	0,00	0,00
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Registrasi Obat	98,00	%	0,00	0,00
3.13	Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan	85,00	%	77,92	91,67
		Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Praklinik/Klinik dan DIP	77,00	Indeks	25,00	32,47
		Persentase keputusan ketepatan waktu pelayanan publik dibidang registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/klinik dan DIP yang diselesaikan tepat waktu	68,00	%	85,77	126,13
		Persentase pengaduan terkait registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/ Klinik dan DIP yang ditindaklanjuti	72,00	%	78,27	108,71

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase pendampingan di bidang registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Pralab/Klinik dan DIP yang efektif	75,00	%	0,00	0,00
		Persentase deregulasi dan debirokratisasi di bidang registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Pra Klinik/ klinik dan DIP	20,00	%	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks RB Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	81,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai AKIP Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	81,00	nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	77,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase pengelolaan TIK Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang baik	70,00	%	0,00	0,00
		Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	96,00	%	0,00	0,00
3.14	Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	71,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks kesesuaian standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	80,00	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang disusun dibandingkan dengan yang direncanakan	80,00	%	29,00	36,25

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase Sosialisasi standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif kepada stakeholder	85,00	%	30,00	35,29
		Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	85,00	%	100,00	117,65
		Indeks RB Unit Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	81,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai AKIP Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	81,00	nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	77,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan OTSKK yang baik di Dit. Standardisasi OTSKK	70,00	%	0,00	0,00
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	100,00	%	0,00	0,00
3,15	Standardisasi Pangan Olahan	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan Pangan Olahan	75,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang standardisasi pangan olahan	83,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat Pangan Olahan yang diselesaikan tepat waktu	82,00	%	96,77	118,01

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase kesesuaian perencanaan penyusunan standar Pangan Olahan sesuai roadmap	100,00	%	100,00	100,00
		Persentase standar Pangan Olahan yang disusun dibandingkan dengan yang direncanakan	91,00	%	30,00	32,97
		Persentase sosialisasi standar Pangan Olahan kepada stakeholder	100,00	%	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks RB Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	81,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai AKIP Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	81,00	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	77,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase pengelolaan TIK Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang baik	70,00	%	0,00	0,00
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	100,00	%	0,00	0,00
3.16	Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat	71,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase kesesuaian perencanaan penyusunan Standar Obat NPPZA sesuai roadmap	80,00	%	80,00	100,00
		Persentase Standar Obat NAPPZA yang disusun dibanding dengan yang direncanakan	84,00	%	24,64	29,33
		Persentase sosialisasi Standar Obat NAPPZA kepada Stakeholder	92,00	%	8,33	9,05
		Indeks RB Direktorat Standardisasi Obat NAPPZA	85,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Nilai AKIP Direktorat Standarisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Aditif	81,00	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standarisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Aditif	77,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Standardisasi ONPPZA yang optimal	1,51	%	0,00	0,00
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standarisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Aditif	100,00	%	0,00	0,00
3.17	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	Jumlah UMKM pangan yang sesuai standar	50,00	UMKM	0,00	0,00
		Presentase Kab/Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP	30,00	Kab/Kota	0,00	0,00
		Persentase kader/fasilitator keamanan pangan yang berpartisipasi dalam pengawasan Makanan	85,00	%	capaian pada TW II	capaian pada TW II
		Indeks Pelayanan Publik Dit. PMPU	3,11	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Jumlah Kab/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	80,00	Kab/Kota	Progres 30%	30,00
		Persentase UPT BPOM yang melakukan pemberdayaan keamanan pangan sesuai Pedoman	80,00	%	0,00	0,00
		Jumlah pelaku UMKM Makanan yang diintervensi keamanan pangan	9.000,00	UMKM	308,00	3,42

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Jumlah pemda yang diintervensi keamanan pangan	100,00	pemda	56,00	56,00
		Jumlah kader/fasilitator yang memahami prinsip keamanan pangan	150,00	kader	0,00	0,00
		Presentase UPT BPOM yang dibina dalam pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	100,00	%	0,00	0,00
		Indeks RB Dit PMPU	81,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai AKIP Dit PMPU	81,00	nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Dit PMPU	77,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase pengelolaan TIK Dit PMPU yang baik	70,00	%	0,00	0,00
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Dit PMPU	90,00	%	0,00	0,00
3.18	Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan	Meningkatnya nilai laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar GLP	72,00	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase laboratorium pengujian BB/Balai POM yang Memenuhi Standar nilai Good Laboratory Practices (GLP)	70,00	%	akhir tahun	akhir tahun
		Presentase metode analisis yang dikembangkan terhadap standar	65,00	%	66,75	102,69
		Persentase pemenuhan baku Pembanding sesuai kebutuhan	70,00	%	69,10	98,71
		Persentase alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi terhadap standar	75,00	%	35,19	46,92
		Persentase sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu	92,00	%	90,46	98,33

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Jumlah jejaring laboratorium pengawasan obat dan makanan yang berpartisipasi aktif	6,00	jejaring laboratorium	1,00	16,67
		Indeks PMPRB PPPOMN	81,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai AKIP PPPOMN	81,00	nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN	77,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Presentase pengelolaan TIK PPPOMN yang baik	70,00	%	0,00	0,00
		Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	93,40	nilai	100,00	107,07
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran PPPOMN	90,00	%	97,89	108,77
3.19	Penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan	Tingkat Keberhasilan Penyidikan Obat dan Makanan	50,00	%	21,67	43,34
		Persentase Efektivitas Koordinasi Lintas Sektor di Bidang Penyidikan	70,00	%	0,00	0,00
		Indeks RB Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	81,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai AKIP Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	81,00	nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	77,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase pengelolaan TIK Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang baik	70,00	%	0,00	0,00
		Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	88,00	%	0,00	0,00
3.20	Riset dan kajian di bidang obat dan makanan	Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	72,00	%	akhir tahun	akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase perencanaan riset dan kajian sesuai Road Map riset dan kajian	71,00	%	85,71	120,72
		Persentase kesesuaian penyelenggaraan riset dan kajian dengan timeline	70,00	%	100,00	142,86
		Persentase hasil riset dan kajian yang didiseminasikan ke stakeholder	15,00	%	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks RB Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	88,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai AKIP Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	80,00	nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks profesionalitas ASN Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	76,00	Indeks	80,57	106,01
		Persentase pengelolaan TIK Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan yang baik	70,00	%	capaian pada TW II	capaian pada TW II
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	93,00	nilai	37,34	40,15
		Tingkat Efisiensi penggunaan Anggaran Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	92,00	%	75,00	81,52

LAMPIRAN II

SERAPAN ANGGARAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2020
SUMBER: APLIKASI OMSPAN
(Per 31 Maret 2020)

A. Unit Pusat

NO	SATUAN KERJA	PAGU	REALISASI	%
1	432731 - SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	391.009.078.000	50.539.144.372	12,93%
	3158 BIRO KERJASAMA	6.565.403.000	586.775.062	8,94%
	3159 BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN	21.662.542.000	3.486.374.220	16,09%
	4110 BIRO HUKUM DAN ORGANISASI	9.891.356.000	1.395.628.521	14,11%
	4111 BIRO HUMAS DAN DUKUNGAN STRATEGIS PIMPINAN	21.445.500.000	1.280.764.586	5,97%
	4112 BIRO UMUM DAN SDM	331.444.277.000	43.789.601.983	13,21%
2	445155 - DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF	44.083.470.000	5.326.445.840	12,08%
	4122 DIT. PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR	9.452.757.000	1.791.582.402	18,95%
	4123 DIT. PENGAWASAN KEAMANAN, MUTU DAN EKSPOR IMPOR OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF	8.732.689.000	581.462.700	6,66%
	4125 DIT. PENGAWASAN PRODUKSI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR	8.262.423.000	1.126.333.408	13,63%
	4127 DIT. REGISTRASI OBAT	9.471.810.000	841.456.452	8,88%
	4131 DIT. STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF	8.163.791.000	985.610.878	12,07%
3	445161 - DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK	34.818.257.000	4.894.214.124	14,06%
	4119 DIT. PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN	10.967.292.000	2.365.328.272	21,57%
	4121 DIT. PENGAWASAN KOSMETIK	8.722.828.000	993.698.614	11,39%
	4128 DIT. REGISTRASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK	9.346.008.000	641.753.518	6,87%
	4129 DIT. STANDADISASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK	5.782.129.000	893.433.720	15,45%
4	445170 - DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN	47.436.268.000	3.470.759.879	7,32%
	4120 DIT. PENGAWASAN PANGAN RISIKO TINGGI DAN TEKNOLOGI BARU	7.832.207.000	302.991.869	3,87%
	4124 DIT. PENGAWASAN PANGAN OLAHAN RISIKO RENDAH DAN SEDANG	10.891.106.000	767.323.644	7,05%
	4126 DIT. REGISTRASI PANGAN OLAHAN	9.079.000.000	915.152.017	10,08%
	4130 DIT. STANDRDISASI PANGAN OLAHAN	8.389.595.000	530.186.590	6,32%
	4132 DIT. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA	11.244.360.000	955.105.759	8,49%

NO	SATUAN KERJA	PAGU	REALISASI	%
5	632437 - DEPUTI BIDANG PENINDAKAN	23.512.536.000	2.305.219.401	9,80%
	4117 DIT. PENGAMANAN	8.315.619.000	832.200.493	10,01%
	4118 DIT. INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN	7.333.624.000	837.142.148	11,42%
	4134 DIT. PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN	7.863.293.000	635.876.760	8,09%
6	INSPEKTORAT UTAMA	21.495.137.000	3.356.879.839	15,62%
	4115 INSPEKTORAT I	16.047.224.000	2.869.865.614	17,88%
	4116 INSPEKTORAT II	5.447.913.000	487.014.225	8,94%
7	4133 PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	63.955.623.000	7.668.082.950	11,99%
8	4135 PUSAT RISET DAN KAJIAN OBAT DAN MAKANAN	21.763.758.000	2.111.469.382	9,70%
9	4114 PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN	58.126.026.000	9.394.058.597	16,16%
10	4113 PUSAT PENGEMBANGAN SDM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	47.946.336.000	8.006.657.225	16,70%
TOTAL SATKER PUSAT		754.146.489.000	97.072.931.609	12,87%

B. Balai Besar / Balai POM

NO	SATUAN KERJA	PAGU	REALISASI	%
1	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAKARTA	44.553.826.000	5.756.165.411	12,92%
2	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	57.217.284.000	8.899.396.726	15,55%
3	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEMARANG	54.715.785.000	7.949.667.901	14,53%
4	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN YOGYAKARTA	37.666.300.000	4.855.486.780	12,89%
5	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA	55.497.326.000	8.592.614.614	15,48%
6	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Banda Aceh	38.531.077.000	4.606.725.409	11,96%
7	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MEDAN	43.900.814.000	5.675.577.827	12,93%
8	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PADANG	44.428.867.000	7.011.384.197	15,78%
9	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PEKAN BARU	39.528.745.000	6.186.098.855	15,65%
10	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAMBI	32.306.241.000	3.729.678.250	11,54%
11	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALEMBANG	35.771.732.000	5.199.320.882	14,53%
12	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDAR LAMPUNG	27.488.284.000	3.841.917.580	13,98%
13	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PONTIANAK	30.811.325.000	3.963.368.281	12,86%
14	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALANGKARAYA	26.792.031.000	3.441.750.491	12,85%
15	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANJARMASIN	53.402.305.000	5.618.000.863	10,52%
16	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SAMARINDA	31.274.822.000	4.810.168.807	15,38%
17	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MANADO	37.622.546.000	4.575.126.840	12,16%
18	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALU	28.037.877.000	3.814.886.126	13,61%
19	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAKASSAR	50.544.323.000	7.541.644.776	14,92%
20	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KENDARI	25.370.478.000	3.692.782.586	14,56%
21	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN AMBON	25.432.526.000	3.770.466.913	14,83%
22	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DENPASAR	43.157.679.000	6.142.979.615	14,23%
23	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MATARAM	33.258.076.000	5.043.233.932	15,16%
24	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KUPANG	30.663.833.000	3.834.843.361	12,51%
25	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAYAPURA	35.057.777.000	4.891.065.070	13,95%
26	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BENGKULU	29.393.014.000	3.559.364.261	12,11%

NO		PAGU	REALISASI	%
27	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG	35.572.866.000	4.751.511.944	13,36%
28	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM	26.438.780.000	3.594.553.135	13,60%
29	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG	20.831.967.000	2.784.703.473	13,37%
30	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO	18.922.030.000	2.342.399.794	12,38%
31	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MANOKWARI	25.456.958.000	2.367.226.977	9,30%
32	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI	25.394.517.000	3.952.079.890	15,56%
33	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAMUJU	17.537.669.000	1.511.910.494	8,62%
TOTAL SATKER DAERAH		1.162.579.680.000	158.308.102.061	13,62%
TOTAL SATKER PUSAT DAN DAERAH		1.916.726.169.000	255.381.033.670	13,32%





BADAN POM

KINERJA **BPOM**

DALAM ANGKA TRIWULAN I TAHUN 2020



Jl. Percetakan Negara
Jakarta Pusat 10560



021 4244691



halobpom@pom.go.id



www.pom.go.id



@bpom_ri



Bpom RI